



LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN
2024

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG BEKASI**

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

Jln. Sersan Aswan No. 8 D, RT002/RW009, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp. (021) 8808888 – Faks (021) 8803832

www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi

@kpknl_bekasi

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
A. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi KPKNL Bekasi	2
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>) Pada KPKNL Bekasi.....	4
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	33
C. Inovasi Dan Prestasi Kerja	33
Bab IV Penutup	38
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Kementerian Keuangan selaku Kementerian yang membidangi urusan keuangan, memegang peranan penting untuk mengatur pola keuangan agar penyelenggaraan negara tetap terus berjalan. Tata kelola negara diuji untuk merubah paradigma atau cara pandang dalam tata Kelola pemerintahan dan budaya kerja aparatur negara sehingga lebih cepat tanggap dan melayani, yang turut memberikan arah positif terhadap pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), sumber daya manusia. Pembaharuan dan perubahan hanya dapat diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah bertahap yang dilandasi tindakan-tindakan konkret dan realistis, serta melakukan revisi atas berbagai regulasi maupun kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang, khususnya terhadap pengelolaan aset negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi sebagai salah satu dari instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat atau pengguna jasa (*stakeholder*), terus berupaya meningkatkan pelayanan dan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak semata-mata ditujukan pada pemenuhan hak-hak sipil warga negara dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, akan tetapi juga dilakukan dengan optimal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara sinergis dan komprehensif sehingga terwujud pelayanan terbaik dan sikap kerja yang berintegritas, profesional, akuntabel, transparan, dan memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh KPKNL Bekasi dalam melakukan penyelenggaraan adalah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perubahan tata kelola pemerintahan yang harus cepat tanggap dalam penyelenggaraan negara yang disesuaikan dengan kondisi turut menuntut untuk melakukan perubahan tata kelola keuangan negara dengan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan

transparan. Perbaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola pemerintahan sehingga menjadi titik temu yang menggerakkan roda-roda perubahan tata kelola pemerintahan. KPKNL Bekasi sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu peranan KPKNL dalam mewujudkan perubahan tata kelola keuangan negara tersebut diantaranya adalah mewujudkan nilai kekayaan negara (Barang Milik Negara) yang wajar dalam neraca pemerintah (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara. KPKNL Bekasi terus menyikapi dengan rasa bakti kepada negara untuk semakin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat luas agar roda perekonomian terus berputar.

Sebagai wujud dari keberhasilan KPKNL Bekasi dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja adalah terpilihnya KPKNL Bekasi sebagai unit yang diikutsertakan dalam beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kantor berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2018.
2. Meraih penghargaan Kantor Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020.

A. TUGAS, FUNGSI, VISI DAN MISI KPKNL BEKASI

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bekasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Bekasi menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, Verifikasi dan Analisa Pertimbangan Permohonan Pengalihan serta Penghapusan Kekayaan Negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan Pelayanan Penilaian;
6. Pelaksanaan Pelayanan Lelang;
7. Penyajian Informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Bekasi sebagai Kantor Berpredikat WBK dan WBBM, senantiasa berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang. KPKNL Bekasi berperan dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang, maupun dalam melakukan pengamanan kekayaan negara melalui kegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara dan sertifikasi tanah pemerintah (Penertiban Barang Milik Negara). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bekasi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan guna mewujudkan reformasi birokrasi berkesinambungan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka memberikan arah, inspirasi, serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam hal ini KPKNL Bekasi memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam tatanan operasional, visi dan misi tersebut akan terus diupayakan untuk dicapai. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bekasi telah memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan pedoman "**Melayani dengan SMART**" yaitu Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif dan Terukur. Melalui moto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bekasi dalam melaksanakan tugas, selalu:

1. Simpatik

Simpatik dalam setiap melaksanakan tugas dan kegiatan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mumpuni

Organisasi yang tangguh dan teruji dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

3. Akuntabel

Produk pelayanan yang cepat, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Responsif

Cepat tanggap dalam melayani pengguna jasa.

5. Terukur

Memberikan pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan, sehingga pengguna jasa merasakan pelayanan murah, cepat, dan tepat waktu.

Dengan pedoman "Melayani dengan SMART", Simpatik, Mumpuni, Akuntabel, Responsif, dan Terukur, KPKNL Bekasi selalu memegang komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUE*) PADA KPKNL BEKASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*business process*) untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Bekasi mengalami beberapa kendala/permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Beberapa kendala/permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara, kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Masih perlu adanya penggalan potensi dari pengelolaan BMN.
 - 2) Jumlah satuan kerja di KPKNL Bekasi relatif lebih sedikit (61 satker), sehingga potensi dari pengelolaan BMN juga rendah.
- b. Berkaitan dengan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, kendali pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK berada di Satker, sehingga **dalam hal hasil pengukurannya di bawah target** maka KPKNL hanya sebatas mendorong optimalisasinya. Kendala yang dihadapi, yakni
 - 1) Satker belum menggunakan atau memanfaatkan BMN secara optimal sehingga menyebabkan nilai peruntukan/penggunaan BMN sesuai standar barang dan standar kebutuhan cenderung kecil.
 - 2) Terdapat beberapa satker belum menyampaikan tindak lanjut optimalisasi SBSK.
- c. Berkaitan dengan sertifikasi BMN kendala yang dihadapi, yakni terdapat target K3 yang tidak berprogres, mayoritas berada pada Satker PTJT Wilayah I, dimana sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti.
- d. Berkaitan dengan kinerja BMN (portofolio aset), kendala yang dihadapi yakni surat tindak lanjut rekomendasi dari satker yang terkait harus menunggu penetapan dari satker tersebut sehingga waktu penyelesaian capaian cenderung lama.

- e. Berkaitan dengan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, kendala yang dihadapi, yaitu kurang aktifnya para satker dalam menindaklanjuti persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bekasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2. Permasalahan pada Seksi Piutang Negara

Beberapa permasalahan dalam pengurusan Piutang Negara pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari pengurusan piutang negara, kendala yang dihadapi yakni debitur tidak datang saat panggilan dan nilai angsuran yang tidak signifikan serta debitur membutuhkan waktu untuk mencari ketersediaan dana, sehingga mekanisme angsuran terbuka menjadi opsi.
- b. Berkaitan dengan penurunan outstanding piutang negara, kendala yang dihadapi yakni debitur yang semula diproyeksikan dapat diselesaikan mengalami kendala karena KPKNL lain belum dapat melakukan perbantuan penelitian dan/atau pemeriksaan serta diperlukannya penelitian kembali terhadap debitur yang memiliki barang jaminan namun dokumen asli tidak dikuasai untuk memastikan mekanisme penyelesaian piutang negara.
- c. Berkaitan dengan saldo BKPN, kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Beberapa debitur yang didatangi masih diperlukan konfirmasi lebih lanjut karena pada saat didatangi rumah dalam keadaan kosong maupun sedang pergi, sehingga mekanisme penyelesaiannya belum dapat dipastikan (pelunasan atau PSBDT).
 - 2) Terhadap debitur yang nominalnya besar, beberapa masih menunggu antrian bantuan penelitian maupun pemeriksaan kepastian barang jaminan.

3. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Penilaian

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Penilaian sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian kendala yang dihadapi yakni
 - 1) Masih terbatasnya permodelan untuk penilaian properti.
 - 2) Sesuai PMK 173/PMK.06/2020 bahwa pelaksanaan penilaian meliputi 7 (tujuh) tahapan yang sebagian besar masih dilakukan secara manual, khususnya dalam menentukan simpulan nilai, sehingga tim penilai/penilai pemerintah membutuhkan banyak waktu untuk melakukan penyelesaian permohonan penilaian.
- b. Berkaitan dengan ketergunaan hasil penilaian, kendala yang dihadapi yakni usulan nilai dari pemohon persetujuan pengelolaan BMN kurang didukung dengan perhitungan yang memadai sehingga nilai usulan yang disampaikan

jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai hasil penilaian sehingga mengakibatkan adanya deviasi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman dari satuan kerja mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan usulan baik nilai limit lelang maupun nilai sewa.

- c. Sesuai Kepdirjen SOP KPKNL Nomor KEP-59/KN/2023, norma waktu penyelesaian pelayanan penilaian dihitung sejak permohonan masuk sampai penyampaian laporan penilaian (*end to end*). Hal ini sejalan dengan Manual IKU Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien sehingga capaian atas IKU ini terpenuhi. Namun demikian, dalam perangkat pemantauan pengendalian utama, perhitungan penyelesaian penilaian dilakukan secara parsial (tahap penyusunan laporan penilaian). Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpatuhan dalam penyelesaian beberapa laporan penilaian.

4. Permasalahan pada Seksi Pelayanan Lelang

Beberapa kendala/permasalahan pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan realisasi penerimaan negara dari lelang, kendala yang dihadapi yakni produktifitas lelang Hak Tanggungan sebagai jenis lelang yang paling besar berkontribusi terhadap capaian PNBPN lelang masih rendah yaitu sebesar 11,8 % atau sebanyak 89,2 % lelang Hak Tanggungan TAP.
- b. Berkaitan dengan realisasi pokok lelang, kendala yang dihadapi yakni kontribusi capaian pokok lelang masih berasal dari lelang HT, dimana lelang HT capaian produktivitas sebesar 11,86% dan sebanyak 89,2 % TAP serta aset yang nilainya besar relative lebih sulit untuk mendapatkan pembeli.
- c. Berkaitan dengan produktivitas lelang, kendala yang dihadapi yakni pasar properti di wilayah kerja KPKNL Bekasi masih cukup baik, namun untuk aset yang nilainya besar belum banyak investor yang tertarik sehingga aset-aset besar sebagian besar belum laku terjual

5. Permasalahan pada Seksi Hukum dan Informasi

Permasalahan yang terjadi pada Seksi Hukum dan Informasi secara umum, sebagai berikut:

- a. Kemungkinan terjadinya deviasi data PNBPN lelang dikarenakan pencatatan dalam Dropbox menggunakan metode akrual (saat PNBPN disetor), pencatatan dalam aplikasi OM-SPAN menggunakan metode kas (saat pembukuan)
- b. Kemungkinan terjadinya deviasi data PNBPN Piutang dikarenakan perbedaan jumlah PNBPN yang diinput pada FocusPN dengan data pada Simponi/SPAN.
- c. Berkaitan dengan Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) kendala yang dihadapi yakni adanya data/informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat luas, permohonan informasi publik tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan yang ditentukan, informasi publik yang dimohonkan

merupakan informasi publik yang dikecualikan serta kemungkinan adanya pengajuan keberatan/sengketa karena ketidakpuasan jawaban yang diberikan

6. Permasalahan pada Subbagian Umum

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Subbagian Umum pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai, kendala yang dihadapi yakni tidak adanya kesadaran dari pegawai dalam membangun kompetensi diri, pengembangan diri, untuk tujuan organisasi yang lebih baik disebabkan kesibukan TUSI pegawai yang utama.
- b. Berkaitan dengan kinerja anggaran, kendala yang dihadapi yakni untuk lebih memaksimalkan nilai IKPA dan IKKPA pada akhir tahun dibutuhkan komitmen dari masing-masing seksi terutama seksi teknis dalam melakukan penarikan dana bulanan dengan target realisasi serta dibutuhkan realisasi capaian output yang sesuai/minimal sama dengan target capaian output yang telah ditetapkan.
- c. Berkaitan dengan kualitas manajemen kinerja dan resiko, kendala yang dihadapi yakni dengan adanya ketentuan baru, IKU ini merupakan IKU yang relatif baru bagi Subbag Umum dimana terdapat pembagian tugas antara Subbag Umum dan Seksi KI yang lebih spesifik, sehingga perlu koordinasi yang lebih baik.

7. Permasalahan pada Seksi Kepatuhan Internal

Beberapa permasalahan yang terjadi pada Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Bekasi, sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan integritas, kendala yang dihadapi yakni survei Penilaian Integritas dilakukan langsung oleh KPK kepada responden internal dan eksternal melalui survei/kuesioner, dimana penilaian dilakukan secara umum (terhadap DJKN) bukan khusus Unit Kantor sehingga realisasi dipengaruhi oleh kantor vertikal lain (tidak dalam kendali).
- b. Berkaitan dengan kualitas manajemen kinerja dan resiko, kendala yang dihadapi yakni dengan adanya ketentuan baru, IKU ini merupakan IKU yang relatif baru bagi Subbag Umum dimana terdapat pembagian tugas antara Subbag Umum dan Seksi KI yang lebih spesifik, sehingga perlu koordinasi yang lebih baik.
- c. Berkaitan dengan efektivitas unit Kepatuhan Internal, kendala yang dihadapi yakni IKU Indeks Efektivitas UKI merupakan IKU baru ada di KPKNL yang memiliki banyak unsur/komponen penilaian dimana terdapat komponen yang nilainya menunggu/berasal dari Kantor Pusat, misalnya SPIP. Penilaian/reviu dilakukan oleh UKI II sehingga bisa saja terdapat perbedaan pemahaman dan

kertas kerja disampaikan oleh Pusat di Q3 akhir, sehingga beberapa kegiatan dilaksanakan terburu-buru

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanakan tugas dan fungsi KPKNL Bekasi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024, telah disusun berdasarkan peta strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kantor Pusat DJKN menetapkan target kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2024 yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga ikhtisar Kontrak Kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	RAW Target 2024	Target 2024
	Stakeholder Perspective(30%)		
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan		
1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Rp28.464.000.000	100%
	a. PNBPN Pengelolaan BMN	Rp6.000.000.000	
	b. PNBPN Piutang Negara	Rp41.000.000	
	c. PNBPN Lelang	Rp22.423.000.000	
1b-CP	Indeks Integritas		89,17
	Customer Perspective(20%)		
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa		
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	71,50%	71,50%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,50%	86,50%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal		
3a-CP	Persentase realisasi pokok Lelang	Rp724.295.000.000	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	Rp2.200.000.000	100%

4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien		
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian		75
Internal Process Perspective (25%)			
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif		
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan	254	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	26	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif		
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	77	48%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional		
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian		16%
Learning & Growth Perspective (25%)			
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif		
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai		90%
8b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel		
9a-CP	Indeks Kinerja Anggaran	100	1000
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif		

10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)		80
9b-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko		80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah		
11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)		82

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun Anggaran 2024, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bekasi tercatat sebesar 114,99%.

1. Gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	126,61%	126,61%
		1b-CP Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Kesesuaian 162 NUP, Optimalisasi 79 NUP)	71,5%	77,85%	108,87%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,50%	96,15%	111,10%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100%	113,85%	113,85%
		3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	112,89%	112,89%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	83,41	106,38%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang diserfikan	100%	126,77%	126,77%

		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	366,67%	366,67%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	48%	41,25%	114,06%
		6b-CP Persentase Produktivitas Lelang	89%	124,76%	140,18%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,17%	198,94%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	113,50%	126,11%
		8b-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	85	96,69	113,76%
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran	100	120	120%
		9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	200%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	108,5	135,63%
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	97,69	119,13%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp3.097.532.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp2.874.658.480,00

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja KPKNL Bekasi Tahun 2024 dengan

- a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir dalam persentase adalah sebagai berikut:

No	IKU	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	55,79%	83,79%	144,54%	80,18%	126,61%

2	Persentase Produktivitas Lelang	24,76%	29,12%	39,66%	103,25%	124,76%
3	Indeks Integritas	-	-	-	89,17	92,44
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	141,95%	73,06%	113,85%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	130,37%	122%	223,75%	127,31%	112,89%
6	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,66	4,65	4,57	4,26	4,29
7	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	100%	100%	82,90%	69,56%	77,85%
8	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	102,96%	101,14%	121,89%	126,77%
9	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara					41,25%
10	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	179,11%	100,57%	143,08%	117,33%	-
11	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	100%	100%	100%	-	-
12	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	-	-	-	100,00%	-
13	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	310%	118,52%	102,88%	155,57%	366,67%
14	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	0,80%	7,70%	0,17%
15	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	76,09	83,41
16	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	95,83%	93,75%	97,14%	97,62%	96,15%
17	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120%	120%	120%	120%	113,50%
18	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	101,71%	96,82%	93,01%	109,68	120
19	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
20	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	-	-	-	100,00%	-

21	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	94,60	96,69
22	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	-	91,28	-
23	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	-	-	-	-	108,5
24	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	97,69

b. Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi adalah sebagai berikut:

No	IKU	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	126,61%
2	Persentase Produktivitas Lelang	34%	124,76%
3	Indeks Integritas	92	92,44
4	Persentase Pencapaian Hasil Lelang (Pokok Lelang)	100%	113,85%
5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20	4,29
6	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	70%	77,85%
7	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	126,77%
8	Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN	100%	-
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN berupa tanah dan bangunan	100%	366,67%
10	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	26%	0,17%
11	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset	80%	96,15%
12	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95%	120%

c. Target Renja Kementerian Keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	70%	77,85%
2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	126,61%
3	Indeks Integritas	92	92,44
No	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024	REALISASI 2024
4	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan	100%	126,77%

5	Persentase Produktivitas Lelang	34%	124,76%
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	112,89%

3. Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Melakukan koordinasi dengan para satker terkait pemanfaatan aset.
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian proses persetujuan pemanfaatan sampai dengan mendorong percepatan terbitnya perjanjian sewa dan pembayaran sewa.
- 3) Melakukan Koordinasi dengan satker terkait penerimaan yang berasal dari BLU
- 4) Melaksanakan pengukuran dan perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK pada bulan Maret s.d bulan Agustus 2024. Sebanyak 79 NUP telah dilakukan Optimalisasi, dan sebanyak 162 NUP telah sesuai SBSK 2024.
- 5) Melakukan koordinasi dengan satker terkait optimalisasi SBSK tahun 2024.
- 6) Melakukan koordinasi dengan para satker terkait untuk segera melakukan tindak lanjut persetujuan.
- 7) Melakukan pengawasan dengan menelusuri dashboard monitoring persetujuan.
- 8) Meminta KPP Pratama Cibitung untuk menerbitkan surat pembatalan sewa.
- 9) Meminta KPP Cikarang Utara, Kementerian Agama Kota Bekasi, dan UPT Asrama Haji Bekasi untuk menerbitkan surat pembatalan sewa.
- 10) Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Barat terkait dengan persertifikatan aset.
- 11) Mengonfirmasi satker terkait tersedianya akun mitra.
- 12) Mengonfirmasi satker terkait penyerahan dokumen yang telah masuk penlok.
- 13) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Satker dari Kementerian PUPR untuk target deleniasi (K3).
- 14) Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait progres pensertipikatan BMN TA 2024.
- 15) Penyampaian rencana survei lapangan kepada satuan kerja yang menjadi objek portofolio aset.
- 16) Penyampaian hasil rekomendasi terkait portofolio aset kepada Balai Perluasan Kesempatan Kerja, MAN 2 Kota Bekasi, MAN 1 Kota Bekasi, MAN 1 Kab. Bekasi, MTsN 1 Kab. Bekasi, MAN 3 Kab. Bekasi, dan MTsN 3 Bekasi pada triwulan IV tahun 2024.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Intensifikasi penagihan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran dan/atau notifikasi Crash Program.
- 2) Melakukan debt dan asset tracing serta berkoordinasi dengan aparat desa dan validasi Kantor Pertanahan.
- 3) Intensifikasi penagihan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran dan/atau notifikasi Crash Program.
- 4) Melakukan debt dan asset tracing serta berkoordinasi dengan aparat desa dan validasi Kantor Pertanahan.
- 5) Konfirmasi keberadaan debitur maupun ahli waris kepada aparat desa.
- 6) Menyampaikan Surat Paksa
- 7) Koordinasi antrian dengan KPKNL terkait.

c. Seksi Lelang

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang agar melakukan lelang ulang bagi obyek yang sudah ada calon pembeli, dan peningkatan pemasaran lelang oleh penjual.
- 2) Memprioritaskan permohonan lelang yang telah ada calon pembeli
- 3) Menghimbau kepada pemohon lelang untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.
- 4) Melakukan verifikasi bersama dengan pemohon lelang yang memiliki banyak jumlah permohonan
- 5) Melakukan penggalan dan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian lelang
- 6) Berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya hak tanggungan dan Kurator agar melakukan lelang ulang dan memasarkan asset-asset besar agar laku terjual melalui lelang
- 7) Memprioritaskan lelang yang sudah ada calon peminat
- 8) Melaksanakan sosialisasi Juknis Lelang kepada para stakeholder.

d. Seksi Penilaian

- 1) Melakukan survei basis data pembanding dan menyampaikan data tersebut kepada Kanwil DJKN Jawa Barat untuk diolah menjadi permodelan penilaian.
- 2) Membuat alat bantu perhitungan penilaian dengan Microsoft excel.
- 3) Memperhatikan tahapan SOP penyelesaian laporan penilaian untuk setiap tahapannya.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang
- 5) Memberikan edukasi kepada pengguna barang secara langsung pada saat Tim Penilai melakukan survei lapangan

e. Subbagian Umum

- 1) Membuat Nota Dinas tentang Pelaksanaan Diklat
- 2) Membuat Program IDP- bagi pegawai
- 3) Mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat melalui aplikasi Diklat
- 4) Melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran.
- 5) Melakukan multi layer checking pembuatan SPM dengan melibatkan Operator, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan PPK.
- 6) Melakukan revisi administrasi dalam rangka penyesuaian halaman III DIPA.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait rencana penarikan dana bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA.
- 8) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam Dropbox dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 10%
- 9) Melakukan penginputan data NTPN secara tepat waktu pada FocusPN.

f. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Menjaga agar deviasi antara data PNBPN dalam Dropbox dan data PNBPN dalam OM-SPAN tidak lebih dari 10%
- 2) Melakukan penginputan data NTPN secara tepat waktu pada FocusPN.
- 3) Memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi sesuai norma waktu yang ditentukan
- 4) Menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik kepada pelaksana PPID Tk. II (Kanwil) sesuai dengan norma waktu yang ditentukan
- 5) Menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada website KPKNL Bekasi.

g. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Telah dibuat unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat
- 2) Membuat pelaporan terkait gratifikasi, identifikasi titik rawan.
- 3) Mengadakan internalisasi antigratifikasi oleh Kepala Kantor
- 4) Mengadakan sosialisasi antikorupsi kepada eksternal oleh Kepala Kantor
- 5) Menyampaikan data responden ke sekretariat DJKN
- 6) DJKN telah menyampaikan matriks action plan SPI 2023 kepada inspektur VII, data responden dan data dukung SPI kepada IBI, serta melakukan sosialisasi antikorupsi/integrity sharing pada event integrity week

- 7) KPKNL Bekasi telah menindaklanjuti rencana aksi s.d. Triwulan III 2024
- 8) Berdasarkan ND Ses DJKN nomor ND-3601/KN.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024, capaian IKU Triwulan III adalah 42 sehingga capaiannya adalah 140%.
- 9) Telah dilaksanakan SPI kepada responden
- 10) Menyusun PK & PMR Kemenkeu Three
- 11) Menyusun SKP Eselon IV, Jabatan Fungsional, dan Pelaksana, Manual IKU, dan Lembar Penetapan Manual IKU, dan Matriks *Cascading* Tahun 2024.
- 12) Melaksanakan dokumentasi terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan kinerja dengan baik, antara lain dokumen terkait *Refinement* Penyusunan IKU dan dokumentasi pelaksanaan penandatanganan kontrak kinerja seluruh pejabat/pegawai.
- 13) Menyusun dan menyampaikan laporan terkait pengelolaan kinerja dan laporan pelaksanaan DKO sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
- 14) Melakukan internalisasi terkait kinerja
- 15) Menyusun dan menyampaikan kertas kerja beserta dokumen pendukung rewiu Manajemen Kinerja Pegawai, Organisasi dan Risiko kepada Kanwil DJKN Jawa Barat.
- 16) Telah melakukan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) secara berkala
- 17) Telah melakukan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP) pada semester I
- 18) Melakukan Penyusunan Profil Pegawai
- 19) Telah melakukan LEPI, PMEPI & FRS 2023
- 20) Telah melakukan dan menyampaikan LHPPU Semester I
- 21) Telah menyampaikan kertas kerja dan dokumen pendukung IKU Efektivitas UKI

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) PNBP per 31 Desember 2024 sebesar Rp507.333.342 atau capaian tahunan sebesar 127,80%
 Penambahan PNBP per 31 Desember 2024 sebesar Rp507.333.342
 Penambahan PNBP per 31 Desember terdiri dari
 - a. Sewa BMN sebesar Rp169.533.788
 - b. Pemindahtanganan BMN sebesar Rp3.188.343
 - c. Penjualan Barang Rampasan/Tegahan sebesar Rp317.201.500
 - d. Pendapatan BLU Lainnya Rp17.409.711
- 2) Pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan pada 1 (satu) K/L yaitu Kepolisian Negara RI sebanyak 162 NUP, namun setelah dilakukan verifikasi terdapat 26 NUP yang *double*, sehingga target seharusnya menjadi 136

NUP; (Polres Metro Bekasi 94NUP dan Polres Metro Bekasi Kota 42 NUP)

- 3) Sudah cek fisik ke lapangan sebanyak 42 NUP Polres Metro Kota Bekasi (sisa 0) dan 94 NUP Polres Metro Bekasi (sisa 0)
- 4) Perhitungan SBSK yang telah disampaikan kepada Kanwil sebanyak 136 NUP (100%) pengukuran baru dan 79 NUP optimalisasi.
- 5) Terdapat Satker yang tidak melakukan tindak lanjut atas persetujuan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bekasi .
- 6) Pada semester I tahun 2024, total persetujuan sebanyak 16 persetujuan, terdapat 15 persetujuan yang sudah ditindaklanjuti.
- 7) Total target sertifikasi pada KPKNL Bekasi sebanyak 254 bidang, terdiri atas K1= 155 bidang, K2= 1 bidang dan K3= 98 bidang.
- 8) Pada Bulan Desember terdapat tambahan capaian sebanyak 24 bidang.
- 9) Capaian s.d. Desember 2024 telah tercapai sebanyak 322 bidang (126,77%) dengan rincian K1=115 bidang, K2=1 bidang, K3= 198 bidang, K4=8 bidang.
- 10) Pengukuran evaluasi kinerja portfolio BMN pada satuan kerja tahun 2024 yaitu sebanyak 23 NUP.
- 11) Target pengukuran evaluasi kinerja portfolio pada triwulan IV (Desember) sebesar 100% dari total NUP.
- 12) Capaian pengukuran evaluasi kinerja portfolio sampai dengan Desember 2024 telah tercapai sebanyak 92 NUP, 13 Rekomendasi, dan 7 surat tindak lanjut rekomendasi dengan persentase sebesar 366,67%.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Capaian IKU untuk PNBPN s.d. Desember tercapai sebesar Rp Rp65,729,865 atau sebesar 160.32% secara perolehan per secara YoY realisasi PNBPN. PNBPN tahun ini yang didominasi dari angsuran debitur.
- 2) Capaian IKU untuk Penurunan Outstanding PN s.d. 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp2,483,477,416 atau sebesar 112.89% secara realisasi perolehan YoY. Penurunan Outstanding PN tahun ini yang didominasi dari angsuran debitur.

c. Seksi Lelang

- 1) PNBPN lelang per 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp.28,303,796,068 atau sebesar 126,23% dari target (Rp23.423.000.000). Target PNBPN Lelang dapat tercapai diantaranya karena tidak hanya lelang nilai limit dengan nominal kecil yang laku terjual, tetapi juga banyaknya lelang dengan nilai limit besar yang laku, sehingga bea lelang yang dipungut berasal dari lelang laku bisa melebihi target..
- 2) Pada tahun 2024, untuk IKU Persentase realisasi pokok lelang, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 113,85%. Realisasi pokok lelang tercapai Rp824.628.825.405 dengan rincian untuk lelang Pejabat Lelang 1 sebesar Rp530.995.708.905 dari target Pejabat Lelang 1 sebesar Rp508.704.000.000,- dan lelang Pegadaian RpRp293.633.116.500 dari

target Rp 215.591.000.000. Baik PL 1 dan Pegadaian dapat tercapai dari target yang ditetapkan, hal ini terjadi karena terdapat lelang dengan nominal besar yang laku terjual.

- 3) Target produktifitas lelang s.d. Desember adalah sebesar 89% dan tercapai sebesar 124,76% didominasi oleh lelang sukarela, lelang non eksekusi wajib, lelang HT dan selain HT. Banyaknya lelang laku pada obyek lelang barang bergerak dapat meningkatkan capaian produktifitas lelang, sedangkan barang tetap yang didominasi lelang eksekusi HT.

d. Seksi Penilaian

- 1) Pada tahun 2024, untuk IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 83,41. Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian, sedangkan penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Masih terbatasnya permodelan untuk penilaian properti. Penyelesaian permohonan penilaian belum dapat dilakukan dengan cepat, khususnya pada saat terdapat permohonan penilaian yang masuk secara bersamaan.
- 2) Pada tahun 2024, untuk IKU Pesentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 0,17%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Adanya usulan nilai dari pemohon persetujuan pengelolaan BMN kurang didukung dengan perhitungan yang memadai mengakibatkan nilai usulan yang disampaikan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai hasil penilaian sehingga mengakibatkan adanya deviasi

e. Subbagian Umum

- 1) Pada tahun 2024, untuk IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 115,30%. Seluruh pegawai telah memenuhi 40 (empat puluh) Jam Pelatihan dengan minimal 1 (satu) pembelajaran sesuai Tusi masing-masing pegawai. Tercapainya target ini karena Subbagian Umum membuat Nota Dinas tentang Pelaksanaan Diklat, membuat Program IDP bagi pegawai dan mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat melalui aplikasi dlklat. Terdapat pegawai yang telah mendapat persetujuan diklat dari kepala kantor tetapi tidak dipanggil oleh bagian kepegawaian (SDM Pusat). Kurangnya minat pegawai terhadap pembelajaran, ini ditunjukkan dengan tidak ditindaklanjuti program-program Individual Development Planning (IDP), dengan cara mendaftarkan diri di aplikasi diklat DJKN.
- 2) Pada tahun 2024, untuk IKU Indeks Realisasi Anggaran, KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 120. Perhitungan IKU ini meliputi perhitungan

terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional. Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

- 3) Deviasi Data PNBP Lelang KPKNL Bekasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,0%. KPKNL Bekasi berhasil menjaga agar deviasi antara data PNBP dalam Dropbox dan data PNBP dalam OM-SPAN tidak lebih dari 10%.

f. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Deviasi Data PNBP Piutang Negara KPKNL Bekasi pada tahun 2024 adalah sebesar 0,0%. Capaian Deviasi Data PNBP Piutang Negara terdiri dari perbandingan selisih PNBP biad pada FokusPN dan Omspan. PNBP pada Biad pengurusan piutang negara pada FocusPN sebesar Rp57.028.229,00. Biad pengurusan piutang negara pada Omspan sebesar Rp57.028.229,00. KPKNL Bekasi berhasil menjaga agar deviasi antara data PNBP dalam FocusPN dan data PNBP dalam OM-SPAN tidak lebih dari 10%
- 2) Pada tahun 2024, untuk IKU Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID), KPKNL Bekasi mencatatkan nilai sebesar 108,50. Peningkatan efektivitas penyediaan layanan data/informasi publik bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu, implikasinya adalah bahwa informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik tersampaikan kepada masyarakat luas

g. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Capaian IKU Indeks Integritas KPKNL Bekasi tahun 2024 sebesar 92,44, melampaui target sebesar 89,17 (atau sebesar 126,61% dari target tahunan). Penilaian dilakukan secara umum (terhadap DJKN) bukan khusus Unit Kantor sehingga realisasi dipengaruhi oleh kantor vertikal lain (tidak dalam kendali).
- 2) Capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko KPKNL Bekasi tahun 2024 sebesar 96,69. Adanya peraturan baru terkait Manajemen Kinerja dan Risiko yaitu KMK Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelola Keuangan Negara, sehingga perlu adanya pembaruan pemahaman terkait kinerja dan risiko pada setiap pegawai (khususnya Seksi KI dan Subbag Umum). Penilaian terkait Manajemen

Kinerja Organisasi, Kinerja Pegawai, dan Risiko dilakukan oleh Kanwil DJKN. Untuk tahun ini, Penilaian dilakukan setiap triwulan dengan kriteria Penilaian yang berbeda.

- 3) IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal merupakan IKU baru ada di KPKNL. Capaian IKU Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal KPKNL Bekasi tahun 2024 sebesar 97,69. Banyaknya unsur/komponen yang menjadi Penilaian Indeks Efektivitas UKI sebagai penilaian IKU dimana terdapat komponen yang nilainya menunggu/berasal dari Kantor Pusat, misalnya SPIP, yang berimplikasi pada pemenuhan komponen-komponen yang menjadi penilaian tidak tercapai secara maksimal.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Jumlah pegawai di KPKNL Bekasi adalah sebanyak 39 orang.

Berkenaan dengan efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Bekasi dalam rangka pembinaan di kepegawaian, berdasarkan data dan usulan ke Kantor Pusat per 31 Desember 2024, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat : 0 orang
- b. Kenaikan Gaji Berkala : 22 orang
- c. Ijin belajar : 0 orang
- d. Pegawai pensiun : 3 orang
- e. Pegawai mengikuti diklat : 39 orang

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PKN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- 4) Pemberian pemahaman terhadap satuan kerja melalui sosialisasi kebijakan Pengelolaan/Penatausahaan BMN dan bimbingan teknis aplikasi SIMAK BMN, Persediaan, SIMAN, SiMantap.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*;
- 2) Menjadikan sarana media sosial (*Whatsapp Group*) sebagai saluran informasi dan penyampaian kendala bagi dan dari satuan kerja; dan
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang berkesinambungan kepada satuan kerja, terutama peraturan-peraturan-peraturan/kebijakan-

kebijakan yang baru terkait pengelolaan/penatausahaan BMN termasuk dalam hal Revaluasi BMN.

b. Seksi Piutang Negara

Pada Seksi Piutang Negara, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi PN;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders penyerah piutang;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga;
- 2) Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di bidang Piutang Negara;
- 3) Penggalan potensi piutang, dengan cara melakukan sosialisasi ke instansi/lembaga pemerintah di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Pada Seksi Pelayanan Penilaian, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar seksi dalam internal KPKNL terutama dengan seksi PKN sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan Penilaian;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Koordinasi yang intensif dengan Kanwil DJKN Jabar dan Direktorat Penilaian
- 2) Koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan stakeholders;
- 3) Membuat program kegiatan pembentukan data pembanding.

d. Seksi Pelayanan Lelang

Pada Seksi Pelayanan Lelang, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, pejabat fungsional Pelelang, dan antar Seksi/Subbagian di internal KPKNL) sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Pelayanan lelang;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;
- 3) Koordinasi dan kerjasama yang intensif, serta pelayanan prima kepada stakeholders pengguna jasa Lelang;
- 4) Kondisi Pasar atau daya beli masyarakat yang rendah, barang yang kurang marketable dan limit yang tinggi merupakan beberapa alasan tidak tercapainya target/rencana seksi lelang.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Memberikan sosialisasi dan publikasi terkait lelang kepada pengguna jasa lelang baik kepada pemohon maupun peminat lelang agar mereka mengenal serta memahami sistem penjualan secara lelang melalui aplikasi *e-auction* yang mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem manual/dengan kehadiran;
- 2) Mengadakan *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholder* pemohon lelang terkait penetapan nilai limit yang wajar dan peningkatan pemasaran terhadap objek lelang.
- 3) Melakukan kunjungan/pertemuan resmi dengan para *stakeholder* di wilayah kerja agar terjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dalam pelayanan lelang.

e. Seksi Hukum dan Informasi

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Seksi Hukum dan Informasi berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan Subbagian Umum guna membiayai biaya-biaya atas pengambilan putusan perkara pengadilan; dan
- 3) Berkoordinasi antar Seksi terutama seksi Pelayanan Lelang dan Piutang Negara untuk melakukan kerja sama terkait penanganan perkara pada KPKNL Bekasi.

f. Subbagian Umum

Pada seksi Hukum dan Informasi, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Subbagian Umum;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target;

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Subbagian Umum berusaha meningkatkan kinerja dengan baik;
- 2) Berkoordinasi dengan Seksi-sesi lain terkait pembiayaan guna pencapaian kinerja organisasi

g. Seksi Kepatuhan Internal

Pada seksi Kepatuhan Internal, hal yang mendukung tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target sebagai berikut:

- 1) Kerjasama antar lini (antara atasan dengan bawahan, maupun antar seksi) di internal KPKNL Bekasi sangat mempengaruhi tercapainya target pada Seksi Hukum dan Informasi;
- 2) Dukungan sarana dan prasarana pada KPKNL Bekasi sangat menunjang kelancaran proses pencapaian target.

Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

- 1) Meningkatkan kompetensi SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop;
- 2) Internalisasi atas tugas dan fungsi Unit Kepatuhan Internal seperti contoh Manajemen Risiko, Pengendalian Internal, Pemantauan Gratifikasi, Pengelolaan Kinerja, dll.;
- 3) Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Bidang KIH Kanwil DJKN Jawa Barat dan Bagian OKI Kantor Pusat DJKN;

7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Adanya satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah satuan kerja yang tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN yaitu sebesar 3,85%, dibawah batas aman IRU Triwulan IV sehingga risiko ini jarang terjadi. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan para satker terkait pemanfaatan aset, melakukan percepatan

penyelesaian proses persetujuan pemanfaatan sampai dengan mendorong percepatan terbitnya perjanjian sewa dan pembayaran sewa dan melakukan koordinasi dengan satker terkait penerimaan yang berasal dari BLU.

- 2) Pada tahun 2024 dengan target sebesar 100% atau sebanyak 254 bidang. Realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang disertifikatkan telah mencapai 322 bidang atau sebesar 126,77%. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah mengajukan usulan penetapan lokasi ke Kanwil DJKN Jawa Barat, Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dan Kantor Pertanahan Kota Bekasi, mengajukan usulan revisi penetapan lokasi ke Kantor Pertanahan, mengonfirmasi satker terkait tersedianya akun mitra serta mengonfirmasi satker terkait kesiapan dokumen permohonan pensertipikatan BMN TA 2024.
- 3) Capaian terkait dengan penggunaan BMN sesuai dengan standar peruntukan/ penggunaan pada tahun 2024 sebesar 77,85% telah mencapai target target tahun 2024 yaitu sebesar 71,5%. Persentase BMN yang underutilized dibandingkan dengan jumlah BMN lingkup KPKNL Bekasi yaitu sebesar 22%. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan pengukuran SBSK pada bulan Maret dan April 2024.
- 4) Untuk risiko adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan para satker terkait untuk segera melakukan tindak lanjut persetujuan serta melakukan pengawasan dengan menelusuri kertas kerja atau pencatatan KPKNL Bekasi.
- 5) Untuk risiko adanya satuan kerja tidak menyampaikan laporan tindaklanjut persetujuan kepada KPKNL, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan para satker terkait untuk segera melakukan tindak lanjut persetujuan serta melakukan pengawasan dengan menelusuri kertas kerja atau pencatatan KPKNL Bekasi.
- 6) Untuk risiko adanya satuan kerja tidak menyampaikan feedback/action plan atas rekomendasi KPKNL, mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah koordinasi dengan satuan kerja yang menjadi target pengukuran evaluasi kinerja portfolio, peninjauan lapangan dari bulan Oktober sampai dengan November 2024, penyusunan laporan pada triwulan IV 2024 dan penyampaian surat rekomendasi dari hasil evaluasi kinerja BMN kepada para satuan kerja.

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Pengakuan atas ketidaktahuan debitur pada awalnya memberikan dampak yang cukup besar, sehingga petugas acap kali sebagai pendekatan pertama melakukan pendekatan persuasif baik itu menjelaskan detail posisi berkas maupun keagamaan. Jumlah debitur yang melakukan pelunasan sebesar 16 debitur, atau diatas batas aman Triwulan IV 2024, jika dibandingkan dengan saldo awal 2024, maka

debitur yang melakukan pelunasan sebanyak hanya 10%. Sampai dengan 31 Desember 2024, capaian IKU outstanding PN telah tercapai sebesar 112,89%, sehingga risiko ini berdampak minor untuk kinerja. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah intensifikasi penagihan debitur, debt dan asset tracing, konfirmasi keberadaan debitur maupun ahli waris kepada aparat desa yang belum ditemukan

- 2) Barang jaminan memegang peranan penting dalam penagihan sebagai salah satu alat paksa. Hampir di seluruh kasus, eksekusi barang jaminan adalah hal yang paling dihindari oleh debitur, sehingga jika tidak ada barang jaminan terlebih nominal hutangnya kecil, debitur memiliki resistensi begitu besar untuk membayar. Sampai 31 Desember 2024, terdapat 94 Berkas Kasus Piutang Negara yang dapat diselesaikan, sehingga capaian IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara telah tercapai 114,06% dari target Tahunan sebesar 48% (IKU Minimize). Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah aktif mengingatkan debitur untuk melakukan pembayaran/angsuran, menyampaikan Surat Paksa, serta debt dan asset tracing barang jaminan debitur.
- 3) Piutang negara yang di setor rendah dikarenakan debitur tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar sehingga tidak ada pembayaran hutang dan tidak tercapainya target IKU penurunan outstanding Piutang Negara. Pada tahun 2024 capaian IKU untuk penurunan outstanding Piutang Negara sampai dengan 31 Desember 2024 tercapai sebesar Rp2,483,477,416 atau sebesar 112.89% secara realisasi perolehan

c. Seksi Lelang

- 1) Realisasi pokok lelang didominasi oleh lelang laku dengan nominal relative kecil dibawah 1 milyar. Produktifitas lelang masih rendah dibandingkan dengan lelang TAP yaitu sebesar 26%, ini berarti sebanyak 74% lelang masih TAP, atau sebanyak 440 RL yang laku dan TAP sebanyak 1.257 RL. Jumlah frek lelang laku dengan nominal harga lelang diatas Rp 1 M sebanyak 87, diatas batas aman, sehingga kemungkinan risiko hampir pasti terjadi. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya hak tanggungan dan kurator agar melakukan lelang ulang dan memasarkan asset-asset besar agar laku terjual melalui lelang serta melakukan edukasi terkait dengan adanya alamat website yang baru.
- 2) Dari 2.190 permohonan lelang yang telah ditetapkan terdapat 1.697 permohonan yang telah dilaksanakan lelang dan sebanyak 493 obyek lelang dibatalkan atau sebanyak 22%, atau berada diatas batas atas batas atas IRU Triwulan IV.
Hal tsb disebabkan karena:
 - Dibatalkan oleh penjual karena pelunasan
 - Dibatalkan oleh Pelelang karena tidak memenuhi syarat formil dokumen pelaksanaan lelang. Seperti SKPT tidak terbit, kesalahan pengumuman dll

Kinerja persentase realisasi pokok lelang telah tercapai 113,85%, Mitigasi resiko yang telah dilaksanakan adalah melakukan komunikasi terkait kendala SKPT dan konsep pengumuman lelang

- 3) Sampai dengan triwulan IV 2024, jumlah frekuensi lelang laku dengan nominal diatas Rp 20M ada 7 frekuensi, berada dibawah batas bawah IRU Triwulan IV. Ke-7 frekuensi lelang yang pokok lelangnya berada diatas Rp20M, menyumbang PNBPN lelang sekitar Rp9,7M atau sebesar 43% dari target tahunan PNBPN lelang, sehingga berdampak sangat signifikan. Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah melakukan koordinasi dengan pemohon lelang dengan asset diatas 20 M.
- 4) Adanya resiko pembagian lelang dan jenis lelang yang tidak merata dikarenakan permohonan lelang didominasi oleh lelang barang tetap yang berasal dari jenis lelang Hak Tanggungan sehingga produktivitas lelang Hak Tanggungan menu

d. Seksi Penilaian

- 1) Adanya resiko penyampaian laporan penilaian yang melebihi batas waktu dikarenakan permohonan yang masuk bersamaan/dalam jumlah banyak sehingga ada keluhan dari pemohon layanan (reputasi). Pada tahun 2024 nilai indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian sebesar 83,41 melebihi target sebesar 75.
- 2) Adanya perbedaan nilai antara permohonan dengan nilai wajar BMN dalam rangka penilaian untuk tujuan pemindahtanganan /pemanfaatan dikarenakan kurangnya pemahaman dari satuan kerja mengenai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan nilai taksiran suatu objek sehingga deviasi ketergunaan hasil penilaian semakin tinggi. Deviasi yang terjadi sampai dengan Desember 2024 sebesar 0,17%. Deviasi yang terjadi masih jauh dibawah batas maksimal yaitu 16%

e. Subbagian Umum

- 1) Realisasi IKU Anggaran telah mencapai 103 dari target tahun 2024 sebesar 100 atau 103%, Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan seksi teknis.
- 2) Kinerja individu pegawai tidak mendukung tercapainya kinerja unit/organisasi yang disebabkan kualitas IKU pegawai rendah dan kompetensi pegawai rendah. Pada tahun 2024, predikat kinerja semua pegawai diatas baik. Persentase capaian kinerja organisasi (NKO) tahun 2024, tercapai sebesar 114,99.
- 3) Rendahnya minat pegawai mengikuti diklat yang disebabkan tingginya load pekerjaan sesuai tugas masing-masing pegawai. Pada tahun 2024, capaian persentase pengembangan kompetensi pegawai sebesar 113,50% (risiko tidak mempengaruhi kinerja (0%).
- 4) Kesalahan pencatatan data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disebabkan tingginya frekuensi transaksi penyetoran bea lelang sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam mencatat PNBPN; kurangnya implementasi pengendalian intern; Belum disetornya PNBPN pada periode

berjalan. Tidak terjadi deviasi data PNBPFungsional DJKN pada tahun 2024

- 5) Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi yang disebabkan oleh pelanggaran nilai-nilai atau prinsip integritas sehingga memperoleh keuntungan dan/atau merugikan pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi. Sepanjang 2022 - 2023 tidak ada kejadian fraud di KPKNL Bekasi (hanya ada dugaan).

f. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Respon atas jawaban PPID Tingkat III DJKN melebihi batas waktu yang ditentukan dikarenakan penyampaian informasi dari unit pemilik data dan informasi melebihi batas waktu yang ditentukan sehingga adanya keberatan dari pemohon informasi publik. Pada tahun 2024 respon jawaban atas permohonan informasi publik dapat disampaikan tepat waktu sehingga tidak menurunkan reputasi dan capaian kinerja KPKNL Bekasi.
- 2) Adanya resiko persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa dan media sosial dikarenakan adanya pemberitaan negatif terkait KPKNL Bekasi dan/atau pegawai KPKNL Bekasi sehingga terjadi persepsi negatif masyarakat terhadap KPKNL Bekasi. Pada tahun 2024 tidak ada pemberitaan negatif terkait KPKNL Bekasi dan/atau pegawai KPKNL Bekasi di media massa dan media sosial.
- 3) Adanya resiko kesalahan pencatatan data Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disebabkan tingginya frekuensi transaksi penyetoran PNBPF sehingga menyebabkan ketidakcermatan dalam mencatat PNBPF, kurangnya implementasi pengendalian intern, belum disetornya PNBPF pada periode berjalan. Tidak terjadi deviasi data PNBPFungsional DJKN pada tahun 2024

g. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Untuk resiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum dikarenakan pelanggaran nilai-nilai atau prinsip Integritas sampai dengan Triwulan IV, di KPKNL Bekasi tidak ada korupsi/gratifikasi/pungli yang dilakukan oleh pegawai sehingga berdampak minor untuk reputasi, mitigasi yang telah dilaksanakan adalah melakukan pelaporan gratifikasi secara berkala dan melakukan internalisasi tolak gratifikasi.
- 2) Adanya resiko loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dikarenakan kejadian pelanggaran non fraud yang dikenakan hukuman disiplin (Hukdis) dan/atau sanksi pelanggaran kode etik dan perilaku sehingga reputasi kantor menurun. Sepanjang 2024 tidak ada kejadian fraud di KPKNL Bekasi.

8. Rekomendasi rencana aksi

a. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

- 1) Melakukan koordinasi dengan satker BLU terkait PNBPN yang berasal dari BLU.
- 2) Berkoordinasi dengan satker terkait aset yang berpotensi untuk dilakukan pemanfaatan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan satker terkait aset yang dipindahtangankan.
- 4) Melakukan revisi anggaran
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Satker untuk optimalisasi BMN
- 6) Melakukan Koordinasi dengan para satker yang telah mendapatkan persetujuan dari KPKNL Bekasi
- 7) Melakukan tracking atau penelusuran dari pencatatan KPKNL Bekasi terkait tindak lanjut persetujuan
- 8) Melakukan koordinasi dengan Satker dan Kantor Pertanahan untuk memantau progres sertifikasi yang sedang berjalan.
- 9) Mengingatkan satker yang belum melakukan deleniiasi melalui sentuh tanahku untuk target K3.
- 10) Melakukan koordinasi dengan para satuan kerja yang menjadi target pengukuran evaluasi kinerja portfolio tahun 2024 antara lain MAN 3 Bekasi, Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Balai Pengujian Kereta Api , MAN 2 Kota Bekasi, MAN 1 Kota Bekasi dan MTsN 1 Bekasi yang dijadwalkan pada Q4 2024.
- 11) Pengumpulan data baik dengan peninjauan lapangan maupun dengan berkomunikasi dengan PIC Satker melalui sosial media.
- 12) Penyusunan laporan serta penyampaian kepada Kanwil DJKN Jawa Barat dan satker yang bersangkutan.
- 13) Penyampaian surat rekomendasi hasil evaluasi portfolio serta berkoordinasi terkait tindak lanjutnya

b. Seksi Piutang Negara

- 1) Intensifikasi penagihan.
- 2) Follow up perbantuan kepada KPKNL lain.
- 3) Meningkatkan pengurusan sampai ke tahap eksekusi lelang PUPN
- 4) Intensifikasi penagihan
- 5) Follow up perbantuan kepada KPKNL lain
- 6) Meningkatkan pengurusan sampai ke tahap eksekusi lelang PUPN
- 7) Penagihan berdasarkan cliustering nominal piutang debitur untuk mengantisipasi outstanding.
- 8) Intensifikasi penagihan dan/atau notifikasi Crash Program
- 9) Follow up perbantuan kepada KPKNL lain
- 10) Meningkatkan pengurusan sampai ke tahap eksekusi lelang PUPN
- 11) Penagihan berdasarkan cliustering nominal piutang debitur dengan nominal kecil.

c. Seksi Lelang

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang
- 2) Melakukan sosialisasi regulasi lelang
- 3) Meningkatkan frekuensi lelang
- 4) Memprioritaskan permohonan lelang yang telah ada calon pembeli
- 5) Menghimbau kepada pemohon lelang untuk mengajukan permohonan lelang yang berpotensi laku.
- 6) Melakukan verifikasi Bersama dengan pemohon lelang yang memiliki banyak jumlah permohonan
- 7) Melakukan penggalan dan koordinasi dengan pemohon lelang untuk meningkatkan capaian lelang
- 8) Berkoordinasi dengan pemohon lelang khususnya hak tanggungan dan Kurator agar melakukan lelang ulang dan memasarkan asset-asset besar agar laku terjual melalui lelang
- 9) Memprioritaskan lelang yang sudah ada calon peminat

d. Seksi Penilaian

- 1) Melanjutkan kegiatan survei basis data.
- 2) Membuat permodelan secara mandiri untuk lingkup KPKNL.
- 3) Memberikan bahan masukan mengenai pembuatan alat bantu perhitungan penilaian.
- 4) Koordinasi dengan Pengelola Barang
- 5) Melanjutkan pemberian edukasi kepada pengguna barang melalui kegiatan sosialisasi maupun pada saat survei lapangan

e. Subbagian Umum

- 1) Mengusulkan nama-nama pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan pendidikan yang dimiliki serta mengingatkan kembali untuk mengikuti diklat.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja Organisasi dan Pegawai secara berkala
- 3) Mengikuti e-learning terkait kinerja dan risiko
- 4) Melakukan reuiu K3 SKP seluruh pegawai secara berkala
- 5) Terus melakukan koordinasi secara berkala dengan KPPN Bekasi dan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan anggaran, seperti Revisi Anggaran
- 6) Melakukan koordinasi dengan Seksi Teknis terkait kebutuhan penarikan anggaran bulanan dan capaian output yang ditargetkan dalam DIPA
- 7) Melakukan penginputan dropbox secara berkala dengan akurat.
- 8) Melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.

f. Seksi Hukum dan Informasi

- 1) Melakukan penginputan data FocusPN secara berkala dengan akurat
- 2) Melakukan rekonsiliasi internal secara berkala.
- 3) Melakukan koordinasi dengan seksi teknis terkait sumber data
- 4) Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi tentang profil KPKNL Bekasi dan data statistik Layanan Informasi Publik serta pemutakhiran Daftar informasi Publik Tersedia setiap saat

g. Seksi Kepatuhan Internal

- 1) Berkoordinasi dengan Sekretariat DJKN dan Kanwil DJKN Jawa Barat terkait nilai indeks integritas
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan kinerja Organisasi dan Pegawai secara berkala
- 3) Mengikuti e-learning terkait kinerja dan risiko
- 4) Melakukan reuiu K3 SKP seluruh pegawai secara berkala
- 5) Berkoordinasi dengan Kanwil DJKN terkait Penilaian/Reuiu IKU

B. Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2024 KPKNL Bekasi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3.097.532.000,00 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Anggaran yang telah direalisasikan untuk mewujudkan kinerja organisasi KPKNL Bekasi berdasar Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Riil, dan Capaian Efisiensi sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran : Rp 2.874.658.480,00
2. Capaian Keluaran Riil : 92,80%

C. Inovasi dan Prestasi Kerja

1. Inovasi

a. Inovasi dan Teknologi Informasi

KPKNL Bekasi memfasilitasi pembuatan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) melalui Pojok SKPT.

b. Program Perubahan

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan

peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, dibentuk Program Perubahan pada KPKNL Bekasi sebagai berikut:

1) Program Revitalisasi dan Penyempurnaan Area Pelayanan Terpadu (REPEAT)

Revitalisasi dan Penyempurnaan APT sebagai public face KPKNL Bekasi, yaitu image/wajah keseluruhan KPKNL Bekasi yang tercermin di depan stakeholder. APT merupakan salah satu titik awal dan akhir interaksi KPKNL Bekasi dengan stakeholder sehingga sangat penting untuk memberikan impresi yang baik. Program ini dinamakan REPEAT karena aktivitas dan kegiatan di APT merupakan proses yang berulang. Proses ini seharusnya memberikan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) menjadi lebih baik di setiap repetisinya.

Penerapan program REPEAT terdiri dari beberapa fokus utama sebagai berikut:

- a) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas (REPEAT SARPRAS), yaitu pemenuhan dan peningkatan fasilitas fisik APT.
- b) Revitalisasi dan Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (REPEAT SDM), yaitu pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia APT.
- c) Revitalisasi dan Penyempurnaan Proses Bisnis (REPEAT SOP), yaitu pemenuhan dan peningkatan Proses Bisnis APT.

2) Program Cengkrama Edukasi dan Idea (Rabu CENDEKIA)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai KPKNL Bekasi, diperlukan sebuah wadah untuk berbagi pengetahuan, edukasi dan ide-ide pegawai. RABU CENDEKIA dijadwalkan rutin setiap Rabu untuk menambah kompetensi pegawai KPKNL Bekasi. Materi yang dibawakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis, tetapi juga soft-skill dan pengetahuan umum. Pegawai yang selesai melaksanakan diklat dijadwalkan untuk menjadi narasumber dalam RABU CENDEKIA. Sesekali waktu KPKNL Bekasi juga mendatangkan narasumber dari pihak yang berkompeten untuk menambah kualitas konten kegiatan ini.

3) Program Galang Semangat Pagi (GSP)

Kegiatan ini merupakan perwujudan budaya Kementerian Keuangan dalam waktu 15-20 menit. Dalam GSP tertuang komitmen dan disiplin pegawai KPKNL Bekasi dalam mengawali hari untuk mencapai tujuan organisasi. GSP diawali dengan pembukaan, pembacaan maklumat pelayanan

bersama-sama, sharing informasi singkat (implementasi one day one information) dan ditutup dengan yel-yel bersama. GSP dijadwalkan pada pukul 08.00 s.d 09.00 WIB bergantian setiap harinya sehingga seluruh pegawai KPKNL Bekasi mendapatkan giliran untuk menyampaikan informasinya dan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan publik (internal).

4) Program Sosialisasi, Interaksi dan Corporate Social Responsibility (LITERASI)

Selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, KPKNL Bekasi juga melakukan interaksi sosial sebagai bagian dari masyarakat. KPKNL Bekasi senantiasa berusaha memberikan kontribusi lebih di luar tugas dan fungsinya. Selama ini KPKNL Bekasi telah melaksanakan sosialisasi dan interaksi baik kepada stakeholder maupun kepada masyarakat secara umum. LITERASI merupakan wadah untuk mendokumentasikan dan public campaign kegiatan tersebut.

5) Program Informasi Kinerja (INFRA)

INFRA merupakan bentuk digitalisasi dalam penyampaian informasi kinerja KPKNL Bekasi. Sebagai satu organisasi, seluruh pegawai seharusnya mengetahui tidak hanya kinerja masing-masing pegawai/seksinya, tetapi juga kinerja KPKNL Bekasi secara keseluruhan.

Penyampaian dilakukan dalam bentuk infografis atau video yang menarik untuk dilihat dan dibaca. INFRA juga dibagikan kepada stakeholder dan masyarakat dalam bentuk digital melalui media sosial dan media lainnya.

6) Program Collaborated Auction (COLLABORAUCTION)

Lelang merupakan salah satu layanan unggulan pada KPKNL Bekasi, dengan target yang selalu meningkat dan challenging dari tahun ke tahun membuat KPKNL Bekasi membuat terobosan dan ide-ide baru untuk mencapainya. COLLABORAUCTION merupakan salah satu upaya untuk mencapai target dan sasaran kinerja dengan melakukan sinergi bersama stakeholder untuk menyelenggarakan lelang skala besar. COLLABORAUCTION diharapkan dapat mendongkrak capaian lelang terutama pada capaian pokok lelang, bea lelang, dan frekuensi lelang laku.

c. Inovasi Prosedur dan Layanan

1) Pendekatan Kepada Pengguna Layanan Melalui *Whatsapp Care*

KPKNL Bekasi senantiasa berupaya untuk dekat dengan pengguna layanan melalui dibukanya kanal informasi berbasis aplikasi Whatsapp.

Melalui aplikasi ini Pengguna layanan dilayani, melalui 2 (dua) metode, yaitu diskusi chat interaktif senin sampai dengan jumat pkl. 8.00 sampai dengan pkl 16.30, dan layanan jawab otomatis diluar jam layanan chat interaktif sehingga *Whatsapp Care* melayani penuh selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu.

2) One Day One Service Penetapan Lelang

Khusus permohonan penjualan BMN, permohonan penetapan lelang akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak surat penetapan lelang sejak dokumen lengkap diterima. Hal tersebut merupakan percepatan dari SOP Layanan Unggulan DJKN dengan norma waktu 2 (dua) hari.

3) One Day One Service Penetapan Status Pengguna BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan Khusus permohonan status penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan. Surat Keputusan akan ditetapkan 1 (satu) hari sejak dokumen lengkap.

4) Sinergi Pelayanan Persetujuan Penjualan BMN Dengan Pelayanan Lelang Sinergi pelayanan dimaksud dalam hal kelengkapan dokumen permohonan lelang BMN yang harus dilampirkan oleh satuan kerja pemohon lelang. Dalam hal ini, satuan kerja tidak perlu melampirkan kembali surat persetujuan Penjualan BMN ketika mengajukan permohonan lelang. Layanan ini berlaku untuk surat persetujuan penjualan BMN yang diterbitkan KPKNL Bekasi.

2. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi yang pernah diraih oleh KPKNL Bekasi:

- a. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018);
- b. Penghargaan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021);
- c. Pejabat Lelang Kelas I Terbaik Ketiga Tahun 2017 dan 2019. (DJKN, 2018 & 2020);
- d. Juara 3 Kompetisi Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan, 2020);
- e. Partisipasi dalam Kegiatan Lelang UMKM Tahun 2021 (Direktorat Lelang DJKN, 2021);

- f. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Penyampaian LPJ Penerimaan Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- g. Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori penyampaian Saldo Rekening Pemerintah Terbaik Periode Semester I TA 2022 (KPPN Bekasi, 2022);
- h. Juara 4 Lomba Cerdas Cermat dalam Rangkaian Kegiatan Carnival Penilaian 2022;
- i. Juara I Tenis Meja Ganda Putra bersama KPKNL Tangerang II sebagai Perwakilan Kantor Pusat DJKN dalam Hari Oeang ke 76 Tahun 2022;
- j. Juara II dalam Grand Final KOIN MAS 2022/2023 yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 untuk kategori Optimalisasi Aset Pada Pengelola Barang KOIN MAS 2022/2003.
- k. Juara II Kategori LPJ Bendahara Penerimaan Periode Semester I Tahun 2024.
- l. Untuk tahun 2024, Capaian Nilai Kerja Organisasi (NKO) sebesar 114,99%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kinerja KPKNL Bekasi secara umum pada Tahun Anggaran 2024 adalah istimewa. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik kecuali IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang serta IKU Persentase realisasi pokok lelang. Adapun Nilai Kinerja Organisasi (NKO) per 31 Desember 2024 tercapai sebesar 114,99%.

Di samping itu, KPKNL Bekasi sebagai Kantor Pelayanan Percontohan peringkat II tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2016 dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi tahun 2018, serta meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2020, tetap mempertahankan pelayanan prima yang bebas korupsi kepada stakeholder. KPKNL Bekasi terus berusaha melaksanakan upaya perbaikan diri dari sisi pelayanan melalui pengembangan inovasi teknologi yang memudahkan tugas tugas sehari-hari. Hal ini menjadi bukti bahwa KPKNL Bekasi belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada.

Diharapkan dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai maupun yang ingin diraih tersebut, menjadi motivasi bagi segenap pegawai baik ditingkatan pelaksana sampai pimpinan untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Kedepan KPKNL Bekasi akan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bukti keseriusan KPKNL Bekasi untuk terus bertransformasi dalam menjaga kualitas dan meningkatkan pelayanan.